

**NAVAL DIPLOMACY DALAM PENGIRIMAN SATUAN TUGAS  
MARITIM TENTARA NASIONAL INDONESIA DI UNITED NATIONS  
INTERIM FORCE IN LEBANON**

**NAVAL DIPLOMACY THROUGH DEPLOYMENT OF  
MARITIME TASK FORCE OF INDONESIAN NATIONAL DEFENSE  
FORCES IN UNITED NATIONS INTERIM FORCE IN LEBANON MISSION**

Trio Sirmareza<sup>1</sup>

(sirmareza.trio@gmail.com)

**Abstrak** - Jurnal ini membahas hasil penelitian tentang partisipasi Indonesia dalam misi UNIFIL MTF sebagai misi matra laut pertama dan satu-satunya di dunia sebagai sebuah *naval diplomacy*. Kajian-kajian terdahulu belum banyak menggunakan teori Ken Booth untuk mengembangkan *naval diplomacy* Indonesia, khususnya dalam pengiriman Satgas Maritim TNI. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis *naval diplomacy* dalam pengiriman Satgas Maritim TNI dan kontribusinya terhadap pencapaian kepentingan nasional dan sasaran kebijakan luar negeri Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menekankan dua kepentingan utama, yaitu pemeliharaan ketertiban dunia itu sendiri sebagaimana dijamin konstitusi, serta meningkatkan peran globalnya sebagai *middle power*. Dalam perspektif *appropriateness* yang dikemukakan Ken Booth, Satgas Maritim TNI memiliki fleksibilitas, mobilitas kemampuan proyeksi dan potensi akses untuk membawa misi diplomatik Indonesia. Secara empiris, Satgas Maritim TNI dalam derajat tertentu mendukung agenda-agenda kebijakan luar negeri Indonesia. Namun demikian, dipandang dari aspek simbolisme, peningkatan kuantitas perlu dipertimbangkan agar Satgas Maritim TNI dapat menjadi *signifier* prestise dan komitmen internasional Indonesia yang maksimal.

**Kata Kunci:** Satgas Maritim TNI, *Naval Diplomacy*, Kepentingan Nasional, Kebijakan Luar Negeri

**Abstract** - This research journal discusses Indonesian participation in UNIFIL MTF, the world first and the only maritime peacekeeping, through deployment of Maritime Task Force of Indonesian National Defense Forces (Satgas Maritim TNI) as a *naval diplomacy*. Previous studies of Indonesian Maritime Task Force did not employ the theory of *naval diplomacy* to analyse further needs of developing a robust Indonesian *naval diplomacy*. Thus, it is necessary to study *naval diplomacy* conducted by Indonesian maritime task force by Ken Booth's theory of *naval diplomacy* and how it can contribute to national interests. The result shows that Indonesia emphasizes two main interests namely maintenance of the world peace based on the Preamble of Indonesia Constitution (Pembukaan UUD NRI 1945) and enhancing Indonesia's global role as *middle power*. Using Ken Booth's theory of *naval*

---

<sup>1</sup> Penulis merupakan alumnus Pascasarjana Program Studi Diplomasi Pertahanan Cohort 2, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia

diplomacy, Indonesia maritime task force does have flexibility, mobility, projection ability and access potential to carry Indonesian diplomatic agenda. Meanwhile, considered from asset of symbolism, Indonesian maritime task force should be bigger whether in quantity or capability to act as maximum signifier of Indonesia's prestige and foreign policy commitment as it has empirically contribute to Indonesian foreign policy objectives.

**Keywords:** Maritime Task Force of Indonesian National Defense Forces, Naval Diplomacy, National Interests, Foreign Policy

## Pendahuluan

**U**nited Nations Interim Force in Lebanon - Maritim Task Force (UNIFIL MTF) adalah operasi perdamaian maritim PBB yang pertama di dunia. Misi ini dimulai pada Oktober 2006 atas permintaan pemerintah Lebanon dengan tujuan mendukung Angkatan Laut Lebanon dalam mengawasi laut teritorialnya agar terhindar dari masuknya senjata-senjata ilegal maupun material-material senjata melalui jalur laut menuju Lebanon. Operasi UNIFIL MTF juga difokuskan untuk melakukan patroli di *line of buoy*<sup>2</sup> antara Israel dan Lebanon. Aspek penting lain dari operasi UNIFIL MTF ini adalah pelatihan yang diberikan kepada Angkatan Laut Lebanon yang bertujuan untuk membekali pasukan agar

dapat melakukan tugas-tugas pengawasan teritorial laut mereka sendiri pada masa yang akan datang seperti yang dilaksanakan oleh MTF. Secara umum, UNIFIL MTF adalah satuan tugas yang menjadi bagian dari keseluruhan mandat UNIFIL.

Dalam misi UNIFIL MTF, Indonesia turut serta mengirim KRI berikut awak dan pasukannya ke perairan Lebanon mulai dari tahun 2009 hingga saat ini di bawah payung hukum Keppres No. 15 Tahun 2006 tentang Kontingen Garuda Dalam Misi Perdamaian di Lebanon. Sampai dengan tahun 2016, Indonesia telah mengirimkan sembilan Satuan Tugas Maritim Tentara Nasional Indonesia (Satgas Maritim TNI) dengan kekuatan utama dari TNI AL.

Pengiriman Satgas Maritim TNI dalam perspektif petinggi Angkatan Laut dan pengambil kebijakan selalu diasosiasikan sebagai sebuah upaya diplomasi. Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi menyatakan,

---

<sup>2</sup> *Line of Buoy* (LoB) adalah batas paling selatan dari perairan yang menjadi sengketa antara Israel dan Lebanon. LoB ditetapkan oleh Israel ditandai dengan *buoy* berwarna kuning yang ditarik sejauh 3 NM ke arah laut. Atas permintaan Lebanon, Satgas UNIFIL MTF melaksanakan patroli di sekitar perairan tersebut untuk mengimbangi patroli kapal yang dilakukan Angkatan Laut Israel di wilayah laut yang dipersengketakan.

“Tugas yang dilaksanakan oleh Satgas Maritim TNI dalam rangka mengemban amanat UUD 1945 adalah wujud nyata *naval diplomacy*.”<sup>3</sup>

Satgas Maritim TNI sebagai unsur TNI AL dalam hal ini telah memerankan fungsi diplomasi, yang lebih dikenal dengan *naval diplomacy*. Konsep *naval diplomacy* ini relevan dengan TNI AL sesuai dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2005 tentang TNI pada pasal 9c di mana TNI AL memiliki fungsi diplomasi untuk mendukung kebijakan luar negeri Indonesia. Lebih lanjut, fungsi diplomasi tersebut dapat ditelusuri melalui tulisan Ken Booth *Navies and Foreign Policy* bahwa Angkatan Laut memiliki tiga peran (*trinity of naval functions*), yaitu peran militer, polisionil dan diplomasi.<sup>4</sup>

Namun demikian, meskipun Satgas Maritim TNI digadang sebagai instrumen diplomasi Indonesia, belum ada kajian yang dapat mengevaluasi pengiriman Satgas Maritim TNI tersebut ditinjau dari perspektif *naval diplomacy* itu sendiri. Lebih jauh, potensi-potensi Satgas Maritim TNI sebagai instrumen diplomasi Indonesia belum pernah digali lebih

dalam dan dimanfaatkan oleh Indonesia secara maksimal. Oleh karena itu, penting melakukan suatu kajian *naval diplomacy* dalam pengiriman Satgas Maritim TNI untuk memahami peran diplomasi dan kemanfaatannya bagi kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih luas sehingga ke depan pemerintah benar-benar memperhatikan pengiriman pasukan perdamaian maritim dan relevansinya bagi kepentingan nasional Indonesia.

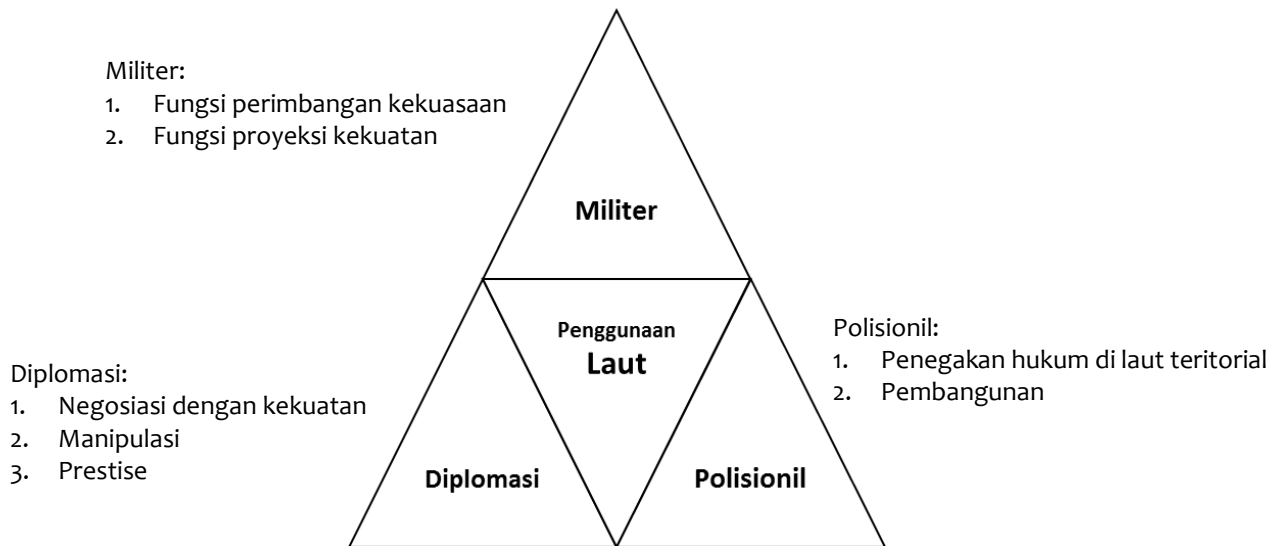
### **Teori *Naval Diplomacy* Ken Booth**

Kerangka analisis utama dalam tulisan ini adalah teori *naval diplomacy* yang dikemukakan oleh Ken Booth. Gagasan Ken Booth dalam bukunya *Navies and Foreign Policy* tentang trinitas fungsi angkatan laut adalah karya yang sangat signifikan sehingga telah banyak dipergunakan sebagai doktrin Angkatan Laut di berbagai negara. Menurut Booth, Angkatan Laut memiliki tiga fungsi yaitu fungsi militer, polisionil dan diplomasi yang secara ilustratif dapat dilihat pada Gambar 1.

---

<sup>3</sup> Koarmatim, *Satgas Maritim TNI KONGA XXVIII-G/UNIFIL* (Surabaya: Koarmatim TNI AL, 2015) hlm.

<sup>4</sup> Ken Booth, *Navies and Foreign Policy* (London: Routledge, 1977), hlm. 16



**Gambar 1. Trinitas Fungsi Angkatan Laut**

Sumber: Booth, 1977, p. 16 (Telah diolah kembali)

Fungsi diplomasi adalah fungsi paling khas dari Angkatan Laut. Fungsi ini berkaitan dengan manajemen kebijakan luar negeri melalui pengerahan kekuatan Angkatan Laut secara terbatas. Kekuatan diplomatis dari Angkatan Laut dapat mendukung kebijakan negara khususnya dalam masa negosiasi maupun dalam interaksi internasional secara umum.<sup>5</sup> Pengerahan Angkatan Laut dalam masa negosiasi dipercaya mampu mempengaruhi *output* dari proses negosiasi tersebut. Selanjutnya, Angkatan Laut juga dapat berperan melalui manipulasi, yaitu memperkuat posisi tawar, menciptakan ancaman pihak ketiga (*proxy threats*), dan dengan mempertontonkan kekuatan Angkatan Laut di laut lepas untuk menarik

perhatian. Fungsi berikutnya yang paling banyak dipakai oleh Angkatan Laut dunia adalah fungsi prestise. Kekuatan Angkatan Laut mampu membentuk ketenangan psikologis di tingkat domestik, memproyeksikan citra umum negara, dan memproyeksikan kekuatan armada laut yang mengesankan, sehingga disegani oleh pihak asing.<sup>6</sup>

Prestise dapat digunakan untuk kepentingan keamanan negara melalui peningkatan reputasi dan kredibilitas militer, citra sebagai negara potensial untuk dijadikan aliansi atau untuk dimintakan bantuan militer, penghormatan terhadap negara dalam berbagai pengambilan keputusan internasional serta kecenderungan untuk memenangkan konflik. Manfaat-manfaat

<sup>5</sup> Ken Booth, *op.cit.*, 19

<sup>6</sup> *Ibid.*, 20

tersebut memiliki implikasi positif terhadap keamanan negara yang diperoleh melalui prestise internasional. Selanjutnya dalam diplomasi, prestise juga dapat digunakan dalam berbagai bentuk, seperti dijelaskan oleh Booth,

*It can oil the efforts of a country's negotiator. A prestigious state is likely to be invited to major international conferences. It is likely to be listened to with more diplomatic courtesy, for its words will be invested with a special credibility and authority... A prestigious state will tend to get its way because other states will tend to defer to its 'natural' authority. It may become a nodal point in diplomatic intercourse. It will claim, and be accorded, the right to be interested, involved, and informed on all issues it thinks relevant. Its propaganda will be relatively effective... In terms of the promotion of the national interest therefore, the advantages of being thought to possess prestige appear overwhelming. Prestige brings respect, authority, deference and responsiveness. It produces efficient power and influence in foreign policy.<sup>7</sup>*

Berbagai keuntungan dapat diperoleh oleh suatu negara dari prestise dalam upaya diplomasi. Dalam suatu perundingan, negara yang memiliki prestise akan lebih sering dilibatkan.

Pelibatan tersebut akan memberikan keuntungan bagi negara untuk tetap *uptodate* dengan isu dan perkembangan internasional sehingga negara dapat mengambil kesempatan dari kondisi tersebut. Lebih lanjut, pelibatan negara yang memiliki prestise seringkali ditanggapi dengan keramahan diplomatik oleh pihak lain karena dianggap sebagai pihak yang memiliki kekuatan untuk menyelesaikan pelbagai persoalan. Kepemimpinan pihak yang memiliki prestise ini terjadi secara alamiah. Negara yang memiliki prestise juga memiliki kekuatan untuk menciptakan propaganda yang efektif di mana suara negara tersebut biasanya didengar oleh aktor-aktor internasional. Secara khusus dalam konteks diplomasi, prestise meningkatkan penghormatan, rasa segan, dan respon cepat dari pihak lain serta meningkatkan kepemimpinan negara dalam media-media interaksi internasional.

*Naval diplomacy* pada hakekatnya hanya berlaku jika kekuatan yang digunakan dalam operasi tersebut relevan, dalam artian benar-benar memberikan pengaruh terhadap *prestige* yang ingin dicapai. Identifikasi terhadap kuantitas dan kualitas yang menentukan kepantasan dari kekuatan Satgas Maritim TNI sebagai *naval diplomacy* penting

---

<sup>7</sup> Ibid., 51

dilakukan mengingat dampak dari *naval diplomacy* dapat memberikan makna yang berbeda-beda.<sup>8</sup> Menurut Ken Booth, terdapat setidaknya 6 (enam) aspek utama yang dapat dianalisis untuk mendeskripsikan suatu *naval diplomacy*, yaitu 1) kuasa dan pengaruh, 2) *influencers* dan *influenced*, 3) *assets* dan *liabilities*, 4) *naval influence*, 5) taktik, dan 6) efek yang ditimbulkan oleh *naval diplomacy*.<sup>9</sup>

### **Kepentingan Nasional Indonesia dalam Pengiriman Satgas Maritim TNI**

Pengiriman Satgas Maritim TNI secara spesifik belum dipandang sebagai sebuah strategi *naval diplomacy* Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia yang lebih luas. Sementara itu, jelas bahwa beberapa negara seperti Brasil, Bangladesh, dan Tiongkok telah menjadikan pengiriman pasukan perdamaian sebagai suatu strategi pencapaian kepentingan nasionalnya. Partisipasi Brasil dalam pengiriman satgas maritimnya di UNIFIL MTF ditujukan sebagai strategi *rising power maintenance* untuk tetap terlibat dalam konflik Timur Tengah.<sup>10</sup> Bangladesh memiliki motivasi lebih kepada untuk mencari insentif dari

PBB melalui *reimbursement*.<sup>11</sup> Dilain pihak, Tiongkok memiliki motivasi ekonomi yang cukup kuat dalam pengiriman pasukan perdamaianya.<sup>12</sup>

Kepentingan nasional Indonesia dalam mengirim pasukan perdamaian termasuk Satgas Maritim TNI secara normatif adalah untuk berpartisipasi aktif dalam memelihara ketertiban dan perdamaian dunia. Secara teoretis, sejalan dengan gagasan Frankel<sup>13</sup>, kepentingan menjaga perdamaian dunia termasuk ke dalam golongan kepentingan objektif Indonesia, karena didasarkan pada nilai dasar konstitusi Indonesia pada Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea Keempat. Kepentingan nasional ini menjadi justifikasi normatif pemerintah dalam pelaksanaan pengiriman pasukan perdamaian.

---

<sup>8</sup> Ibid., 29

<sup>9</sup> Ibid., 26-47

<sup>10</sup> Lihat dalam Ariana E. Abdenur, *Rising Power in Stormy Seas: Brazil and the UNIFIL Maritime Task Force. International Peacekeeping*, Routledge Taylor & Francis Group (2016)

---

<sup>11</sup> Lihat dalam Riaz, Ali, and Mohammad Sajjadur Rahman, eds. *Routledge Handbook of Contemporary Bangladesh* (Routledge, 2016).

<sup>12</sup> Kajian ini dapat dilihat dalam karya Benjamin S. Lawson, *The Price of Peace: A Quantitative Analysis of Economic Interests and China's Involvement in United Nations Peacekeeping Operations* (Tesis: Georgetown University, 2011)

<sup>13</sup> Dalam Scott Burchill, *The National Interest in International Relations Theory* (New York: Palgrave Macmillan, 2005). Frankel mengklasifikasikan kepentingan nasional terdiri dari objektif dan subjektif. Kepentingan nasional objektif adalah kepentingan yang berkaitan dengan sejarah, ideology, geografi dan atribut permanen lainnya yang melekat dalam negara. Sementara itu, kepentingan subjektif adalah kepentingan nasional yang lebih dinamis merujuk pada definisi dan sikap elit terhadap dinamika politik.

Selanjutnya, kepentingan nasional subjektif Indonesia adalah untuk memperkuat diplomasi *middle power*. Dalam konteks ini Indonesia ingin menempatkan diri sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan global secara selektif.<sup>14</sup> Dalam rangka mencapai kepentingan tersebut, Kemlu RI juga menetapkan strategi politik luar negeri Indonesia dengan jalan memperkuat diplomasinya di PBB; meningkatkan partisipasi dalam pengiriman pasukan perdamaian; dan meningkatkan diplomasi Indonesia dalam penyelesaian konflik Timur Tengah. Pengiriman Satgas Maritim TNI menjadi relevan untuk mencapai strategi kebijakan luar negeri Indonesia tersebut dipandang dari bobotnya sebagai pasukan perdamaian maritim satu-satunya PBB dan tugas diplomatiknya sebagai mana tertuang dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Pasal 9c.

### **Naval Diplomacy dalam Pengiriman Satgas Maritim TNI**

Booth memahami *naval diplomacy* sebagai sebuah strategi *naval influence politics* dari pada *naval power politics* yang lebih dekat dengan penggunaan

ancaman kekerasan. Satgas Maritim TNI dalam konteks ini berperan dalam kerangka *naval influence politics* di mana pengiriman satgas tersebut tidak memiliki tujuan menciptakan ancaman, namun menciptakan kolaborasi. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Alit Jaya bahwa *naval diplomacy* dikemas secara komprehensif melalui berbagai aktivitas-aktivitas Angkatan Laut yang positif<sup>15</sup>. Secara teoretis, pendapat Alit Jaya terkonfirmasi oleh Both Turner dan Luttwak<sup>16</sup> yang memposisikan *gunboat diplomacy* berdampingan dengan *naval diplomacy* dalam definisi yang luas, namun memiliki aktivitas yang berbeda. Tujuan *naval diplomacy* adalah untuk membangun hubungan yang kolaboratif. Keikutsertaan dalam operasi multinasional dan latihan bersama dapat meningkatkan hubungan antar negara di satu sisi, di sisi lain meningkatkan kemampuan Angkatan Laut itu sendiri. Dengan demikian, pengiriman Satgas Maritim TNI sebagai *naval diplomacy* harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional.

---

<sup>14</sup> Kementerian Luar Negeri, *Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tahun 2015-2019* (Jakarta: Kementerian Luar Negeri, 2015)

---

<sup>15</sup> Komunikasi personal dengan Alit Jaya, Rabu, 14 Desember 2016 di KRI Yos Sudarso, Koarmatim TNI AL.

<sup>16</sup> Lihat Christian Le Mièrè., *Maritime Diplomacy in the 21st Century: Drivers and Challenges*. (New York: Routledge, 2014), hlm. 22-23.

Menurut Booth, terdapat 3 taktik dasar pengerahan armada sebagai upaya *naval diplomacy* dalam kerangka *naval influence politics*, yaitu *naval aid*, *operational visits*, dan *specific goodwill visits*<sup>17</sup>. Dilihat sebagai sebuah upaya *naval diplomacy*, Satgas Maritim TNI ternyata memiliki peran dalam ketiga bentuk *naval diplomacy* tersebut.

*Pertama*, Satgas Maritim TNI sendiri merupakan bantuan yang diberikan kepada PBB untuk melaksanakan misi di Lebanon. Bentuk *naval diplomacy* melalui *naval aid* tersebut dapat membangun akses dan hubungan kerjasama dengan negara atau entitas target. Dalam konteks ini, maka Satgas Maritim TNI juga berperan untuk meningkatkan kerjasama Indonesia dengan Lebanon dan meningkatkan posisi Indonesia di PBB. Sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia untuk meningkatkan citra internasional, bantuan Indonesia terhadap PBB dan Lebanon sebagai pasukan perdamaian setidaknya berkontribusi terhadap pandangan positif dunia terhadap Indonesia.

*Kedua*, sebagai bentuk *operational calls*, Satgas Maritim TNI melaksanakan kunjungan di beberapa pelabuhan dunia untuk melakukan *maintenance*,

penambahan peralatan dan penambahan logistik selama perjalanan lintas laut Indonesia-Lebanon. *Operational calls* secara teoritik dapat dimanfaatkan untuk mengesankan negara yang dituju melalui sikap dari para awak kapal, kecanggihan teknologi yang terdapat dalam kapal perang, dan hiburan yang diberikan kepada pihak-pihak dalam negara target. Lebih lanjut, kunjungan seperti ini dapat dimanfaatkan secara bertahap untuk membangun prestise dan posisi tawar negara pengunjung, sehingga meningkatkan pengaruh terhadap negara target. Secara praktis, fungsi operasional ini telah dimanfaatkan oleh Satgas Maritim TNI untuk keperluan teknis. Namun secara politis, belum ada arahan dari Kemlu RI sebagai pemangku kepentingan utama dalam hubungan luar negeri Indonesia, untuk memanfaatkan fungsi tersebut.

*Ketiga*, sebagai bentuk *specific goodwill visit*, Satgas Maritim TNI melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat diplomatik, seperti menyelenggarakan *courtesy call*, *cocktail party* dan kegiatan seremonial lain. Alit Jaya sebagai mantan Dansatgas Maritim TNI menyatakan bahwa Indonesia mendapatkan sambutan yang baik di negara-negara yang dikunjungi semasa

---

<sup>17</sup> Ken Booth, *op.cit.*, 40



linas laut Lebanon-Indonesia, terutama di Pakistan dan India.<sup>18</sup> Dari pengalaman tersebut, dapat dipahami bagaimana posisi Indonesia di negara-negara yang dikunjungi menjadi semakin baik dan meningkatkan kualitas persahabatan antar negara dan antar Angkatan Laut. Satgas Maritim TNI juga memanfaatkan kunjungan-kunjungan tersebut untuk menawarkan beragam kerjasama dalam rangka meningkatkan posisi Indonesia di negara-negara tersebut.

Dapat dipahami bahwa selain mendukung posisi Indonesia baik di PBB dan Lebanon, Satgas Maritim TNI sesungguhnya dapat dimanfaatkan untuk agenda politik luar negeri yang lebih praktis terhadap negara-negara yang menjadi *partner* dalam UNIFIL MTF maupun negara-negara yang disinggahi selama lintas laut Indonesia-Lebanon. Namun demikian, fungsi ini memang belum banyak dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satgas Maritim TNI seperti kunjungan dengan Angkatan Laut negara lain serta pejabat lokal lain dalam *courtesy call* maupun *cocktail party* pada dasarnya potensial untuk dapat dipergunakan oleh Indonesia dalam

rangka membangun hubungan lebih lanjut dengan negara-negara sahabat.

### **Perspektif kepantasan (*appropriateness*) Satgas Maritim TNI sebagai instrumen *naval diplomacy***

*Naval diplomacy* pada hakekatnya hanya berlaku jika kekuatan yang digunakan dalam operasi tersebut relevan, dalam artian benar-benar memberikan pengaruh terhadap prestise yang ingin dicapai. Identifikasi terhadap kuantitas dan kualitas yang menentukan kepantasan dari kekuatan Satgas Maritim TNI sebagai *naval diplomacy* penting dilakukan mengingat dampak dari *naval diplomacy* dapat memberikan makna yang berbeda-beda.<sup>19</sup> Kekuatan armada yang besar belum tentu memiliki pengaruh yang besar, sebaliknya armada kecil sekalipun belum tentu memberikan pengaruh kecil. Untuk itu, penting untuk melakukan analisa terhadap kepantasan dari suatu armada sebagai instrumen diplomasi sesuai dengan konteks dimana, kapan dan bagaimana armada kapal perang tersebut dikerahkan.

Komponen utama dari penugasan Satgas Maritim TNI adalah kapal perang jenis korvet dan personel TNI AL. Sebagai instrumen diplomasi, kapal perang secara teoritik memiliki 7 (tujuh) aset dasar yaitu

---

<sup>18</sup> Komunikasi personal, Rabu, 14 Desember 2016 di KRI Yos Sudarso, Koarmatim TNI AL

---

<sup>19</sup> Ken Booth, *op. cit.*, hlm. 29.

fleksibilitas, pengendalian, mobilitas, kemampuan proyeksi, potensi akses, simbolisme dan ketahanan.<sup>20</sup> Dalam konteks pengiriman Satgas Maritim TNI, terdapat 5 (lima) dari 7 (tujuh) asset dasar dalam teori *naval diplomacy* yang relevan untuk menilai Satgas Maritim TNI. Analisis tersebut secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1. Modalitas Satgas Maritim TNI sebagai Instrumen Diplomasi**

Modalitas	Relevansi Satgas Maritim TNI
Fleksibilitas	Dapat melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan dan operasi jenis lainnya (SAR dan VBSS).
Mobilitas	Cukup tinggi dan relevan dengan misi UNIFIL MTF
Kemampuan Proyeksi	Menunjukkan kemampuan <i>long distance operation</i>
Potensi akses	Dapat melakukan muhibah ( <i>goodwill visit</i> ) kepada negara-negara sahabat

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 33-36

Simbolisme	Sebagai <i>signifier</i> dan <i>prestige</i> Satgas Maritim TNI dibandingkan dengan satgas lain dalam UNIFIL MTF masih relatif sama.
------------	--

Dalam aspek fleksibilitas, Satgas Maritim TNI telah dipersiapkan untuk berbagai macam aktivitas pemeliharaan keamanan di laut. Tidak hanya sebagai kapal yang memiliki kemampuan untuk perang, armada KRI satgas tersebut juga memiliki kemampuan untuk melakukan tugas-tugas kemanusiaan seperti *search and rescue*, *VBSS (visit, board, search and seizure)*, *winching* (penderekan), dan kemampuan untuk melaksanakan pemantauan udara karena dilengkapi dengan helikopter.<sup>21</sup> Fleksibilitas dalam Satgas Maritim TNI memiliki makna bahwa kapal perang Indonesia yang dikirim dapat melaksanakan tugas-tugas pemeliharaan perdamaian di laut Lebanon namun juga memperlihatkan kekuatan militer Indonesia, khususnya Angkatan Laut.

Dalam aspek mobilitas, Indonesia dalam sejarah pengiriman Satgas Maritim TNI telah mengirimkan kapal SIGMA Class

<sup>21</sup> Koarmatim, *op. cit.*

KRI Diponegoro (365) dan KRI Sultan Iskandar Muda (367) hingga jenis *Multi Role Light Frigate* (MRLF) KRI Bung Tomo (357) dan KRI John Lie (358). KRI Diponegoro (365) merupakan kapal pertama dari korvet kelas SIGMA milik TNI Angkatan Laut, yang dibuat oleh galangan kapal Schelde, Belanda pada tahun 2005 khusus untuk TNI-AL. KRI jenis SIGMA tersebut bertugas sebagai kapal patroli dengan kemampuan anti-kapal permukaan, anti-kapal selam dan anti-pesawat udara. Kapal perang ini memiliki bobot mati 1.700 ton. SIGMA merupakan singkatan dari *Ship Integrated Geometrical Modularity Approach*. Korvet Kelas SIGMA TNI AL dibangun berdasarkan konsep ini memberikan fleksibilitas tinggi bagi TNI AL dengan biaya yang minim namun memungkinkan modularitas dalam desainnya.<sup>22</sup>



Gambar 1. KRI Sultan Iskandar Muda (367) (kiri) dan KRI Diponegoro 365 (kanan), Kapal perang jenis korvet kelas SIGMA

Selanjutnya, kapal perang Indonesia jenis MRLF milik TNI Angkatan Laut dilengkapi dengan persenjataan 1 x Oto Melara 76 mm gun, 2 x MSI Defence DS 30B REMSIG 30 mm guns, 16 VLS untuk meluncurkan MBDA (BAE Systems) MICA *Surface-to-Air Missile* (SAM), 2 x 4 Quad untuk meluncurkan 8 misil MBDA (Aerospatiale) Exocet MM 40 Block II dan 2 x triple BAE Systems 324 mm torpedo tubes untuk menghancurkan sasaran permukaan maupun bawah air; dan diperkuat dengan 1 Heli Bolkow BO-105/NV-410 dari Pusat Penerbang Angkatan Laut (Wening, 2016). Kapal ini

---

<sup>22</sup> Artileri, "Kapal Perang: Mengenal 4 Korvet Kelas SIGMA TNI AL", diunduh dari Artileri.org: <http://www.artileri.org/2014/03/4-korvet-kelas-sigma-tni-al.html>

memiliki berat 1,940 ton dengan panjang keseluruhan 95 meter lebar 12,8 meter dengan tenaga penggerak mesin 4x Man B & W ruston diesel engine yang dapat menyemburkan tenaga hingga berkecepatan mencapai 30 knot dengan daya jelajah 9.000 km.<sup>23</sup>



Gambar 2. KRI Bung Tomo (357) dan KRI John Lie (358), Kapal perang jenis korvet kelas Multi Role Light Frigate (MRLF)

Kedua jenis korvet yang dikirim oleh Indonesia dalam UNIFIL MTF adalah dua diantara kapal-kapal terancangih Indonesia yang memiliki kemampuan mobilitas tinggi. Mobilitas kapal yang tinggi ini

dibuktikan dengan kemampuannya untuk dapat berlayar dari Indonesia menuju Lebanon, meskipun membutuhkan logistik yang cukup besar dan persinggahan pada pelabuhan-pelabuhan lain.

Selanjutnya, dalam aspek kemampuan proyeksi kekuatan, Booth mengatakan bahwa kapal perang menjadi sarana berbagai macam persenjataan yang dapat memberikan efek ancaman terhadap lawan, baik terhadap kapal lainnya atau ancaman serangan dari laut ke darat dan serangan amfibi.<sup>24</sup> Namun demikian, dalam konteks Satgas Maritim TNI, berkaitan dengan tujuan operasi dan fungsi satgas sebagai kekuatan PBB, maka kemampuan proyeksi kekuatan yang relevan hanya untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu melakukan *long distance operation*.<sup>25</sup>

Kemudian, dalam aspek potensi akses, Satgas Maritim TNI memiliki keuntungan tersendiri dari pelaksanaan operasi UNIFIL MTF. Jarak yang cukup jauh antara Indonesia dengan Lebanon di satu sisi memang menjadi beban bagi Indonesia baik dari segi biaya maupun

---

<sup>23</sup> Choiriah, *Peristiwa: Ini persenjataan canggih KRI Bung Tomo selama bertugas di Lebanon*. Diunduh dari [Merdeka.com: https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-persenjataan-canggih-kri-bung-tomo-selama-bertugas-di-lebanon.html](https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-persenjataan-canggih-kri-bung-tomo-selama-bertugas-di-lebanon.html)

---

<sup>24</sup> Ken Booth, *op. cit.*, hlm. 34

<sup>25</sup> Komunikasi personal dengan Komandan Satgas Maritim TNI KONGA XXVIII-G MTF-7 KRI Sultan Iskandar Muda, Rabu, 14 Desember 2016 di KRI Yos Sudarso, Koarmatim

tantangan operasi bagi personel TNI. Namun di sisi lain, jarak jauh ini menjadi akses bagi Indonesia untuk melaksanakan muhibah (*goodwill visit*) di negara-negara lain selama perjalanan seperti Turki, Oman, Mesir, Srilangka.

Aspek simbolisme adalah aspek terpenting dalam analisis kepantasan Satgas Maritim TNI sebagai instrumen diplomasi. Kondisi bahwa satgas tersebut berada di bawah Kendali PBB hampir mendegradasi banyak potensi Satgas Maritim TNI sebagai instrumen diplomasi negara dalam kerangka *naval diplomacy*. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana kuantitas dan kualitas KRI dalam Satgas Maritim TNI dapat memperlihatkan prestise Indonesia dan mempengaruhi kebijakan luar negeri yang lebih luas.

Simbolisme menurut Booth adalah karakter kapal perang yang mampu menjadi pemberi sinyal politis. Kapal perang dengan jenis paling besar atau jumlah yang besar secara khusus akan lebih berguna dan menjadi pemberi sinyal serta representasi niat, komitmen dan kekuatan negara.<sup>26</sup> Satgas Maritim TNI dalam hal ini mengirimkan kapal kelas SIGMA dan MRLF yang masuk ke dalam jenis korvet, yaitu kapal perang yang

berukuran lebih kecil dari jenis fregat, namun lebih besar dari kapal patroli (*fast patrol boat*). Dibandingkan dengan negara pengirim kapal lainnya, Satgas Maritim TNI belum memiliki keunggulan signifikan.

---

<sup>26</sup> Ken Booth, *op. cit.*, hlm. 36

Tabel Kekuatan Satgas Maritim UNIFIL

No.	Negara TCC UNIFIL MTF	Jumlah Kapal Perang	Nama Kapal	Tipe
1	Bangladesh	2	1) BNS Ali Haider Leopard-class 2) BNS Nirmul Durjoy-class	Frigate Large patrol craft
2	Brasil	1	F43 Liberal Niteroi-class	Frigate
3	Jerman	1	F260 Braunschweig-class	Corvette
4	Yunani	1	HS Nikiforos Elli-class	Frigate
5	Turki	1	F505 TCG Bafra	Corvette
6	<b>Indonesia</b>	1	KRI Bung Tomo (357) MRLF-class	Corvette
<b>Kapal Israel dalam Blokade Laut Lebanon 2006</b>				
1	Israel	2	1) INS Hanit Sa'ar-5 class 2) INS Lahav Sa'ar-5 class	Corvette Corvette

Sumber: Berbagai sumber

Tabel perbandingan jumlah dan tipe kapal di atas menunjukkan bahwa sebagai *naval presence* Satgas Maritim UNIFIL sangat relevan untuk menggantikan kapal perang Israel yang digunakan untuk memblokade laut Lebanon. Namun demikian, untuk Indonesia sendiri dapat dilihat bahwa masih kurangnya bobot Satgas Maritim TNI sebagai simbol prestise dari sisi kuantitas dan kapasitas kapal perang. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. *Pertama*, kapal markas jenis fregat dikirim

oleh Brasil yang sekaligus menjadi MTF *Commander*. Fregat yang lain juga dikirim oleh Bangladesh dan Yunani. *Kedua*, jenis korvet juga dikirim oleh sebagian besar satgas dalam UNIFIL MTF dengan kemampuan yang relatif sama. *Ketiga*, jumlah armada KRI yang dikirim hanya satu. Sementara Bangladesh mengirim dua kapal kelas fregat leopard dan *patrol boat*. Dalam sejarah perjalanan operasi UNIFIL MTF tersebut, Jerman bahkan sempat mengirim 3 (tiga) kapal perangnya.

## **Pengiriman Satgas Maritim TNI untuk Mendukung Agenda Kebijakan Luar Negeri Indonesia**

Agenda politik luar negeri Indonesia secara umum adalah meningkatkan pengaruh secara terus menerus di dunia internasional untuk membuka peluang sebesar-besarnya bagi pencapaian kepentingan nasional. Untuk meningkatkan pengaruh tersebut, maka Indonesia perlu meningkatkan peran globalnya. Sejalan dengan gagasan tersebut, kerangka untuk meningkatkan peran Indonesia di tingkat global sebagai *middle power* mengacu pada Renstra Kemlu 2015-2019 tentang arah kebijakan dan strategi politik luar negeri adalah dengan 1) melaksanakan diplomasi Indonesia dalam penanganan konflik di Timur Tengah, 2) meningkatkan partisipasi Indonesia dalam pengiriman pasukan pemelihara perdamaian, dan 3) penguatan diplomasi Indonesia di PBB yang efektif.<sup>27</sup>

Dalam Renstra Kemlu RI tersebut secara jelas disebutkan bahwa dalam rangka memperkuat peran globalnya, Indonesia memiliki strategi untuk terlibat secara aktif dalam resolusi konflik di Timur Tengah dan meningkatkan partisipasinya dalam misi pemeliharaan

perdamaian. Berdasarkan Renstra tersebut, setidaknya terdapat 4 (empat) agenda politik luar negeri Indonesia yang relevan dengan pengiriman Satgas Maritim TNI. Empat agenda politik ini secara eksplisit maupun implisit tertuang dalam Renstra Kemlu RI, arahan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan didukung oleh pernyataan yang disampaikan pihak-pihak pemangku kepentingan yang relevan dengan pengiriman Satgas Maritim TNI dalam rangka mendorong tercapainya kepentingan Indonesia tersebut.

### *Indonesia sebagai Peacekeeping Leader*

Indonesia ingin menjadi *peacekeeping leader* di PBB. Sesuai dengan pembukaan UUD NRI 1945, pemeliharaan perdamaian dunia masuk dalam salah satu sikap ideologis dan konstitusional Indonesia terhadap keamanan internasional. Misi pemeliharaan perdamaian PBB merupakan wadah paling signifikan bagi Indonesia untuk melaksanakan konstitusi tersebut. Ambisi Indonesia untuk menjadi pemimpin dalam *peacekeeping* PBB tertuang dalam Renstra Kemlu RI dalam rangka meningkatkan peran global Indonesia, maka salah satu strateginya adalah meningkatkan partisipasi Indonesia dalam misi pemeliharaan

---

<sup>27</sup> Kementerian Luar Negeri, *op. cit.* hlm. 47

perdamaian PBB. Terkait agenda tersebut, Purnomo Yusgiantoro selaku Menteri Pertahanan Indonesia periode 2010-2014 juga mengemukakan bahwa target Indonesia adalah untuk menjadi pemimpin dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia.<sup>28</sup> Pengiriman Satgas Maritim TNI telah berkontribusi secara jumlah dan prestise terhadap tujuan tersebut.

Keinginan Indonesia tersebut semakin konkret dengan ditetapkannya Visi 4.000 *Peacekeepers* pada tahun 2019. Visi ini diperkuat secara legal formal melalui Peraturan Menteri Luar Negeri No.5 Tahun 2015 Tentang Peta Jalan Visi 4.000 Personel Pemeliharaan Perdamaian Tahun 2015-2019. Visi ini juga menjadi salah satu strategi Kemlu RI untuk meningkatkan peran dan pengaruh Indonesia sebagai negara *middle power* di dunia internasional (Kemlu, 2015, p. 50).<sup>29</sup> Visi 4.000 *peacekeepers* tersebut adalah suatu upaya Indonesia agar secara konsisten berada pada 10 besar pengirim *peacekeepers*. Pencapaian tersebut diyakini dapat meningkatkan peran Indonesia melalui pelibatan sebagai pemegang jabatan-jabatan strategis di

PBB dan mempermudah saluran penyuaan aspirasi Indonesia.<sup>30</sup>

Pengiriman Satgas Maritim TNI menjadi salah satu kontributor untuk menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dalam misi pemeliharaan perdamaian. Kepemimpinan Indonesia di dalam misi pemeliharaan perdamaian merupakan pencapaian yang dapat menjadikan Indonesia memiliki posisi tawar yang tinggi di PBB. Sehingga keinginan-keinginan Indonesia dapat diakomodasi oleh negara-negara di dalam PBB. Lebih lanjut, untuk mendukung kepentingan Indonesia menjadi pemimpin dalam pemeliharaan perdamaian tersebut, kualitas dan kuantitas dari Satgas Maritim TNI harus di tambah.<sup>31</sup>

#### *Kampanye Pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB*

Indonesia telah menyatakan kesiapan untuk menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB periode 2019-2020. Upaya kampanye pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB sudah dilakukan oleh Kemlu RI sejak tahun 2009. Menteri Luar Negeri saat ini (periode 2014-2019), Retno

---

<sup>28</sup> Komunikasi personal dengan Purnomo Yusgiantoro pada Rabu, 26 Oktober 2016, di Universitas Pertahanan

<sup>29</sup> Kementerian Luar Negeri, *op. cit.* hlm. 50

---

<sup>30</sup> Komunikasi Personal dengan Adityawarman; Cassidy; Octavian; Yusgiantoro, 2016.

<sup>31</sup> Komunikasi personal dengan Dikdik Setiadi, Komandan Satuan Latihan PMPP TNI pada Kamis, 20 Oktober 2016 di PMPP TNI



L. P. Marsudi, secara resmi memulai kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB pada sidang umum PBB September 2016 sebagai salah satu negara calon dari Asia Pasifik. Meskipun Indonesia harus bersaing dengan beberapa negara, pencalonan Indonesia hingga saat ini sudah didukung oleh cukup banyak negara.

Pengajuan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB merupakan suatu langkah yang strategis agar Indonesia ikut serta dalam konstelasi keamanan dunia. DK PBB merupakan badan PBB yang menjadi *core* dari politik keamanan internasional. Berdasarkan keterangan dari Purnomo Yusgiantoro, pengiriman Satgas Maritim TNI adalah salah satu modal untuk mendorong kampanye tersebut.<sup>32</sup> Lebih lanjut, Fikri Cassidy dari Kemlu RI menjelaskan bahwa pengiriman Satgas Maritim TNI dapat dijadikan sebagai salah satu modal untuk mendorong tujuan tersebut.<sup>33</sup> Dengan demikian, pengiriman Satgas Maritim TNI dalam misi UNIFIL di sini memiliki posisi sebagai modal dalam upaya diplomasi Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK

PBB. Modal ini disalurkan melalui peningkatan citra Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap perdamaian dunia dan pengembangan hubungan baik Indonesia dengan Lebanon. Hal ini membuka kesempatan Indonesia untuk mendapatkan dukungan baik dari Lebanon maupun negara-negara lain dalam pencalonan tersebut.

#### *Peningkatan Peran Indonesia dalam Konflik Timur Tengah*

Misi UNIFIL merupakan misi yang cukup unik karena masyarakat Indonesia memiliki simpati yang cukup besar terhadap negara-negara di Timur Tengah yang berpenduduk Muslim. Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar memiliki simpati yang cukup besar terhadap Lebanon. Terlebih lagi, *adversary* dari Lebanon dalam konflik tersebut adalah Israel, dimana masyarakat Indonesia memiliki posisi yang sangat keras menentang Israel, ditambah dengan pendudukannya terhadap Palestina yang notabene berpenduduk Muslim juga. Cassidy menyampaikan bahwa konflik Lebanon tersebut dalam derajat tertentu dapat menjadi representasi keterlibatan Indonesia secara pro aktif dalam resolusi

---

<sup>32</sup> Komunikasi personal dengan Purnomo Yusgiantoro pada Rabu, 26 Oktober 2016, di Universitas Pertahanan

<sup>33</sup> Komunikasi personal dengan Fikri Cassidy pada Kamis, 13 Oktober 2016 di Kantor P2KOL Kementerian Luar Negeri

konflik Timur Tengah.<sup>34</sup> Gagasan ini juga didukung oleh Octavian bahwa kepentingan Indonesia dengan mengirimkan Satgas Maritim TNI adalah sebagai *signifier* untuk menunjukkan solidaritas terhadap Lebanon.<sup>35</sup> Namun demikian, baik Cassidy maupun Octavian menekankan bahwa misi pemeliharaan perdamaian sifatnya imparial. Dengan demikian, agenda tersebut tidak dapat diekspresikan terhadap publik internasional. Hanya saja, persepsi dan pandangan positif Lebanon dan negara Timur Tengah lainnya dari pengiriman Satgas Maritim TNI di sana dapat dimanfaatkan oleh Indonesia.

Secara keseluruhan, pengiriman Satgas Maritim TNI yang cukup membebani anggaran ini menunjukkan urgensi Indonesia untuk terlibat dalam konflik Timur Tengah, terutama Lebanon, agar posisi Indonesia di Timur Tengah semakin kuat. Di masa yang akan datang, *bargaining position* Indonesia secara khusus di Lebanon dan secara umum di Timur Tengah tentu dapat menjadi modal untuk mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan merujuk pada fakta bahwa Timur Tengah adalah

kawasan yang kaya dengan sumber daya alam strategis (minyak bumi). Disamping itu, solidaritas ini juga dapat membangun *people-to-people understanding* sehingga masyarakat Indonesia dihargai keberadaanya di Timur Tengah.

#### *Perluasan Jaringan Negara Sahabat*

Pengiriman Satgas Maritim TNI pada misi perdamaian maritim UNIFIL juga memiliki implikasi upaya diplomasi untuk memperluas jaringan negara sahabat Indonesia. Dalam konteks ini Satgas Maritim TNI tidak hanya sekedar melakukan operasi di dalam UNIFIL MTF, tapi juga melaksanakan aktivitas lain yang dapat mempererat hubungan baik Indonesia dengan negara lain, bahkan dengan negara-negara yang belum memiliki hubungan dekat dengan Indonesia.

Salah satu aktivitas dalam pengiriman Satgas Maritim TNI adalah dilaksanakannya *courtesy call* pada pelabuhan-pelabuhan persinggahan baik dalam perjalanan dari Indonesia menuju Lebanon maupun Lebanon ke Indonesia. *Courtesy call* dalam konteks diplomasi adalah pertemuan formal diplomat atau perwakilan negara yang berkunjung atau melaksanakan pertemuan ramah-tamah baik dengan kepala negara maupun dengan pejabat pemerintahan lainnya.

---

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Komunikasi personal dengan Amarulla Octavian pada Kamis, 27 Oktober 2016 di Universitas Pertahanan

Pertemuan ini secara konseptual memiliki nilai simbolis. Meskipun *courtesy call* pada umumnya tidak membicarakan isu spesifik, namun tetap memiliki makna diplomatik yang cukup kuat. Lebih jauh, bagi Morgenthau, seremonial diplomatik dapat mengilustrasikan sekaligus meningkatkan relasi kekuasaan antar negara, elit dan aktor.<sup>36</sup> Seremonial diplomatik melalui *courtesy call* tersebut kemudian dapat pula memperlihatkan bagaimana posisi Indonesia di mata negara sahabat.

Pelaksanaan *courtesy call* Satgas Maritim TNI secara umum mendapatkan sambutan yang baik berupa penerimaan, keramahan, dan keterbukaan yang diberikan baik itu oleh pihak pelabuhan maupun pemerintah setempat berikut masyarakatnya di negara tujuan. Sebagai contoh, Dansatgas Maritim TNI KONGA XXVIII-F/UNIFIL dengan KRI Frans Kaisiepo (368) yang sempat mengunjungi Pelabuhan Mersin di Turki menyatakan bahwa KRI banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari Angkatan Laut Turki. Melalui *courtesy call*, hubungan

---

<sup>36</sup> Lihat dalam C. J. Reynolds, Diplomatic gastronomy: The convivial nature of the power of prestige, cultural diplomacy and soft power. *The International Conference on Cultural Diplomacy & the UN" Cultural Diplomacy & Soft Power in an Interdependent World: The Opportunities for Global Governance* (2012), hlm. 2.

diplomatik antara Indonesia dan Turki menjadi semakin erat, khususnya hubungan antar Angkatan Laut. Pejabat dan Angkatan Laut Turki sebaliknya juga mengapresiasi kunjungan Satgas Maritim TNI.<sup>37</sup>

Hubungan yang bersahabat ini dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperluas kerjasamanya dengan negara-negara lain melalui pengiriman Satgas Maritim TNI. Selain itu, kunjungan antar Angkatan Laut ini tentu juga meningkatkan *trust* antara Indonesia dengan negara lain.<sup>38</sup> Rasa saling percaya atau yang dikenal dengan *confidence building measures* sejatinya merupakan langkah-langkah yang diambil untuk membangun rasa saling percaya di antara pihak-pihak yang berkonflik. Namun dalam konteks ini, Satgas Maritim TNI membangun CBMs dalam rangka secara konsisten mempererat hubungan bersahabat dengan negara lain melalui Angkatan Laut dengan harapan mencegah konflik yang mungkin muncul di masa yang akan datang.

---

<sup>37</sup> Lihat dalam artikel TNI AL, *Farewell Courtesy Call Dansatgas Maritim TNI*, diunduh dari website resmi TNI AL: <http://www.tnial.mil.id/News/Seremonial/tabid/79/articleType/ArticleView/articleId/22820/Default.aspx>

<sup>38</sup> Komunikasi Personal dengan Marthen Roytamus (mantan Kadiv Peperangan Atas Air Satgas Maritim TNI) pada Rabu, 14 Desember 2016 di KRI John Lie, Koarmatim.

Selanjutnya, kenyataan bahwa Indonesia bukanlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, atau Perancis yang memiliki pangkalan di luar negeri. Hubungan baik Indonesia dengan negara-negara tersebut yang dibangun melalui kunjungan-kunjungan diplomatik tersebut sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan. Sebagai ilustrasi, jika Indonesia membutuhkan pelaksanaan operasi jauh di luar batas wilayah, Indonesia dapat memanfaatkan negara sahabat sebagai pangkalan.<sup>39</sup> Dengan demikian, pengiriman Satgas Maritim TNI merupakan salah satu upaya untuk memperluas jaringan negara sahabat Indonesia yang dapat dimanfaatkan di masa yang akan datang.

### **Kesimpulan**

Kepentingan nasional yang menggerakkan Indonesia untuk mengirim Satgas Maritim TNI adalah untuk menjaga perdamaian dunia sebagai mandat konstitusi dan meningkatkan peran global Indonesia sebagai *middle power*. Satgas Maritim TNI, sebagai instrumen yang relevan dari sudut pandang *appropriateness* (kualitas dan kapabilitas) dalam teori *naval diplomacy* Ken Booth, telah dapat menunjukkan fungsinya sebagai representasi kepentingan

perdamaian Indonesia dan meningkatkan profil Indonesia di tingkat internasional tersebut. Ditinjau dari aspek politik, Satgas Maritim TNI dalam derajat yang beragam mendukung agenda politik luar negeri Indonesia sebagai *middle power* untuk menjadi *peacekeeping leader*, anggota tidak tetap DK PBB, aktor yang berperan aktif dalam konstelasi politik dan konflik Timur Tengah, serta negara dengan jaringan negara sahabat yang luas. Namun demikian, dari aspek simbolisme sebagai konsekuensi logis dari perbandingan Satgas Maritim TNI dengan kekuatan satgas maritim UNIFIL lainnya, kuantitas pengiriman Satgas Maritim TNI belum dapat menjadi *signifier* yang maksimal. Untuk itu, Indonesia perlu mempertimbangkan peningkatan kuantitas Satgas Maritim TNI demi pencapaian kepentingan nasional yang lebih optimal dan mendukung sasaran kebijakan luar negeri praktis Indonesia.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Booth, K. (1977). *Navies and Foreign Policy*. London: Routledge.
- Koarmatim. (2015). *Satgas Maritim TNI*. Surabaya: Koarmatim TNI AL.
- Mière, C. L. (2014). *Maritime Diplomacy in the 21st Century: Drivers and Challenges*. New York: Routledge.

#### **Jurnal**

- Reynolds, C. J. (2012). Diplomatic gastronomy: The convivial nature of the power of prestige, cultural

---

<sup>39</sup> Ibid.

diplomacy and soft power. *The International Conference on Cultural Diplomacy & the UN" Cultural Diplomacy & Soft Power in an Interdependent World: The Opportunities for Global Governance.*

0901/15/580186/hebat-kri-bung-tomo-357-ungguli-kapal-perang-negara-lain

### **Dokumen Resmi dan Peraturan Perundang-Undangan**

Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2015-2019

Keppres No. 15 Tahun 2006 tentang Kontingen Garuda Dalam Misi Perdamaian di Lebanon

Undang-undang No. 34 Tahun 2005 tentang TNI

### **Sumber Online**

Admin. (2017, Januari 16). *Farewell Courtesy Call Dansatgas Maritim TNI.* Retrieved from TNI AL: <http://www.tnial.mil.id/News/Seremonial/tabid/79/articleType/ArticleView/articleId/22820/Default.aspx>

Artileri, A. (2011, Juli). *Kapal Perang: Mengenal 4 Korvet Kelas SIGMA TNI AL.* Retrieved from Artileri.org: <http://www.artileri.org/2014/03/4-korvet-kelas-sigma-tni-al.html>

Choiriah, M. (2015, Agustus 27). *Peristiwa: Ini persenjataan canggih KRI Bung Tomo selama bertugas di Lebanon.* Retrieved from Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-persenjataan-canggih-kri-bung-tomo-selama-bertugas-di-lebanon.html>

Fardah. (2011, Desember 20). *Feature: RI gearing up for bigger role in UN peacekeeping missions.* Retrieved from Antara News: <http://static.antaranews.com/en/news/78581/ri-gearing-up-for-bigger-role-in-un-peacekeeping-missions>

Wening, A. A. (2016, September 1). *Nasional: Hebat! KRI Bung Tomo-357 Ungguli Kapal Perang Negara Lain.* Retrieved from Kabar24.com: <http://kabar24.bisnis.com/read/2016>